

KEEFEKTIFAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN ANAK TERLANTAR DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

ANUGRAH KARTIKA YUDHA

NPP. 32.0571

Asdaj Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email: 32.0571@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Marthalina, S.IP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The phenomenon of an increasing number of neglected children in Tangerang Regency has become a serious concern, especially due to the mismatch between the achievements of social service programs by the Social Service Agency and the actual conditions on the ground. According to BPS data, the number of neglected children in Tangerang Regency reached 80,134 in 2023, making it the region with the highest number of neglected children in Banten Province. Although performance reports show that the PMKS (Social Welfare and Protection Services) program has exceeded its targets, the number of neglected children has significantly increased. This raises a major question regarding the effectiveness of the child neglect handling program in the region. **Objective:** This study aims to analyze the effectiveness of the child neglect handling program implementation by the Social Service Agency of Tangerang Regency and identify the supporting and inhibiting factors affecting the success of the program. **Method:** This research uses a descriptive qualitative method. Data collection techniques include in-depth interviews with related informants, document studies of policies and agency reports, and field observations. Data analysis uses the interactive model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data presentation, and conclusion/verification drawing. **Results/Findings:** The findings indicate that the program has provided real benefits in the form of basic services such as clothing, food, and social rehabilitation. However, its effectiveness is not yet optimal due to several constraints, including low data validity of recipients, limited facilities and budget, shortage of professional staff, and negative stigma from the community. **Conclusion:** The implementation of the child neglect handling program in Tangerang Regency has been underway, but it has not reached maximum effectiveness. There is a need to improve data accuracy, strengthen human resources and budget allocation, and actively involve the community and NGOs to support the sustainability of the program more comprehensively.

Keywords: Program Effectiveness, Abandoned Children, PMKS, Tangerang Regency, Social Rehabilitation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Fenomena meningkatnya jumlah anak terlantar di Kabupaten Tangerang menjadi perhatian serius, terutama karena ketidaksesuaian antara capaian program pelayanan sosial oleh Dinas Sosial dan kondisi riil di lapangan. Berdasarkan data BPS, jumlah anak terlantar di Kabupaten Tangerang mencapai 80.134 jiwa pada tahun 2023, menjadikannya wilayah dengan jumlah anak terlantar tertinggi di Provinsi Banten.

Meskipun laporan kinerja menunjukkan bahwa pelayanan PMKS telah melampaui target, jumlah anak terlantar justru meningkat signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait efektivitas pelaksanaan program penanganan anak terlantar di daerah tersebut. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keefektifan pelaksanaan program penanganan anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan program tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan terkait, studi dokumentasi terhadap kebijakan dan laporan instansi, serta observasi lapangan. Analisis data menggunakan teknik interaktif model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah memberikan manfaat nyata dalam bentuk layanan dasar seperti sandang, permakanan, dan rehabilitasi sosial. Namun, efektivitasnya belum optimal karena terkendala oleh validitas data penerima yang rendah, keterbatasan fasilitas dan anggaran, kekurangan tenaga profesional, serta stigma negatif dari masyarakat. **Kesimpulan:** Pelaksanaan program penanganan anak terlantar di Kabupaten Tangerang sudah berjalan, namun belum mencapai efektivitas maksimal. Diperlukan peningkatan akurasi data, penguatan sumber daya manusia dan anggaran, serta keterlibatan aktif masyarakat dan LSM untuk mendukung keberlanjutan program secara lebih komprehensif.

Kata Kunci: Keefektifan Program, Anak Terlantar, PMKS, Kabupaten Tangerang, Rehabilitasi Sosial

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup suatu bangsa. Mereka memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang sehat, aman, dan penuh kasih sayang (Cascio, WF., (1995). Negara Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya (Abdul Razak, 2020). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak anak yang belum mendapatkan hak-hak dasarnya, terutama anak-anak yang masuk dalam kategori anak terlantar (Fekamahsa, R.A, 2024).

Anak terlantar merupakan salah satu bentuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus (Steers, R.M, 1984). Menurut Kementerian Sosial (2022), anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara layak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, karena ditinggalkan atau tidak diasuh oleh orang tua maupun wali (Victory, M., (2024). Fenomena ini tidak hanya terjadi di daerah pedalaman atau tertinggal, tetapi juga di wilayah dengan perkembangan ekonomi yang tinggi, seperti Kabupaten Tangerang.

Anak terlantar di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk kemiskinan, kurangnya akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan, eksploitasi, dan stigma sosial. Meskipun mereka menunjukkan ketahanan, sumber daya, dan keinginan kuat untuk masa depan yang lebih baik, mereka seringkali kekurangan dukungan dan kesempatan untuk keluar dari keadaan mereka. Resiliensi anak terlantar dalam menghadapi tantangan sosial sering kali dipengaruhi oleh kondisi keluarga, dukungan sosial, serta pengalaman trauma masa lalu (Fitryasari et al., 2023). Pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman hidup anak-anak ini sangat penting untuk merancang program penanganan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Program pembinaan anak jalanan dan anak terlantar sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya koordinasi lintas sektor, lemahnya sosialisasi, serta keterbatasan sumber daya (Hidayah, 2020). Hal ini senada dengan hasil penelitian sebelumnya yang

menyebutkan bahwa pemahaman masyarakat dan partisipasi publik menjadi faktor penting dalam keberhasilan program (Nurwati et al., 2022). Selain itu, Strategi implementasi kebijakan yang tidak disesuaikan dengan kondisi lokal menyebabkan efektivitas program penanganan anak jalanan menjadi rendah. Hal ini mengindikasikan pentingnya penyesuaian pendekatan berbasis komunitas dalam perumusan kebijakan daerah (Rachmawati & Faedlulloh, 2021).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang tahun 2023, jumlah anak terlantar di wilayah ini mencapai 80.134 jiwa. Angka ini menjadikan Kabupaten Tangerang sebagai daerah dengan jumlah anak terlantar tertinggi di Provinsi Banten (BPS Kabupaten Tangerang, 2023). Hal ini menimbulkan keprihatinan, mengingat Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang cukup maju secara infrastruktur dan pembangunan sosial.

Ironisnya, Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 menyatakan bahwa pelaksanaan program pelayanan sosial untuk PMKS, termasuk anak terlantar, telah melampaui target yang ditetapkan (Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, 2023). Ketidaksesuaian antara capaian program di atas kertas dan kondisi riil di lapangan menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas program yang dijalankan.

Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab antara lain rendahnya validitas dan akurasi data penerima manfaat, keterbatasan anggaran dan fasilitas penunjang, minimnya tenaga profesional di bidang sosial, serta kurangnya peran serta masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam mendukung program.

Kondisi tersebut mendorong pentingnya dilakukan kajian dan evaluasi terhadap keefektifan program penanganan anak terlantar di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana pelaksanaan program dilakukan, kendala yang dihadapi, serta potensi yang dapat dikembangkan agar intervensi sosial yang diberikan dapat tepat sasaran dan berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meningkatnya jumlah anak terlantar di Kabupaten Tangerang menjadi fenomena yang kontradiktif dengan data capaian program yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan data BPS Kabupaten Tangerang tahun 2023, terdapat 80.134 anak terlantar di wilayah tersebut, menjadikannya yang tertinggi di Provinsi Banten (BPS Kabupaten Tangerang, 2023). Padahal, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Tangerang tahun 2023 mencatat bahwa capaian program pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk anak terlantar, telah melebihi target yang ditetapkan (Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, 2023).

Kesenjangan ini menunjukkan adanya masalah implementasi yang belum teridentifikasi secara komprehensif. Dalam banyak kasus, indikator keberhasilan program lebih menekankan pada output administratif seperti jumlah bantuan yang disalurkan, bukan pada outcome jangka panjang seperti penurunan angka anak terlantar secara nyata. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program, bukan hanya dari segi capaian kuantitatif, tetapi juga kualitas dampaknya.

Selain itu, belum banyak penelitian yang secara khusus menyoroti efektivitas program penanganan anak terlantar di daerah urban berkembang seperti Kabupaten Tangerang. Sebagian besar kajian sebelumnya lebih berfokus pada aspek perlindungan anak secara umum, tanpa melihat secara mendalam bagaimana pelaksanaan kebijakan intervensi sosial di level daerah memengaruhi keberlanjutan hidup anak-anak yang masuk kategori terlantar.

Dengan demikian, terdapat gap penelitian yang penting untuk diisi, yaitu bagaimana program penanganan anak terlantar yang telah dijalankan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dievaluasi secara kualitatif berdasarkan faktor pendukung, penghambat, serta sejauh mana

program tersebut mampu mencapai tujuannya dalam realitas sosial yang kompleks. Penelitian ini menjadi relevan untuk memberikan rekomendasi strategis berbasis temuan empiris yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan kebijakan dan program sosial di masa mendatang.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian dari beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh peneliti lain, bertujuan untuk mencari perbandingan, mengolaborasikan, serta menemukan inspirasi baru dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang relevan dengan topik keefektifan program penanganan anak terlantar menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai program yang diimplementasikan, keefektifannya masih rendah. Misalnya, penelitian Biru Bara Nirvana, Cahyadi Nira Zhafirah Puspitasari, Dewi Austine Britania, dan Kalvin Edo Wahyudi (2021) yang berjudul "*Efektivitas Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya*". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program belum optimal dijalankan, karena masih terdapat anak yang belum dapat bertindak secara normatif dalam mengikuti aturan yang berlaku. Selain itu, kurangnya motivasi, keaktifan, dan minat berprestasi dari anak-anak juga menjadi faktor penghambat dalam keberhasilan program tersebut (Cahyadi, B. B. N., 2021).

Penelitian lain yang relevan adalah oleh Leny Husna dan Dedi Epriadi (2020) dengan judul "*Analisis Kinerja Pemerintahan Daerah dalam Penanganan Anak Terlantar Usia Sekolah*". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Studi dilakukan terhadap Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan anak terlantar usia sekolah di Kota Batam masih belum efektif. Hal ini disebabkan belum adanya kebijakan khusus yang secara spesifik mengatur penanganan anak terlantar, serta kurangnya pendekatan dan program pelayanan yang mampu memaksimalkan kinerja dinas terkait. Peneliti merekomendasikan pentingnya pembentukan kebijakan yang lebih terarah serta penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program (Husna, L., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Avita Putri Wiryawan (2024) berjudul "*Analisis Efektivitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal*" menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: manfaat program yang belum sepenuhnya dirasakan oleh penerima layanan, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program rehabilitasi (Wiryawan, A. P., 2024).

Penelitian oleh Hidayah, M. R. (2022) berjudul "*Anak Balita Terlantar: Studi Kasus di UPTD Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Tangerang*" fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar anak balita terlantar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar anak balita terlantar di UPTD Rehabilitasi PMKS Kabupaten Tangerang sudah cukup terpenuhi dalam tiga aspek, yaitu kebutuhan asuh (makanan, perawatan kesehatan, lingkungan, hygiene, dan rekreasi), kebutuhan asih (kasih sayang, rasa aman, dan penghargaan diri), serta kebutuhan asah (kognitifitas, komunikasi, kemandirian, moral, dan spiritual). Namun, meskipun kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, terdapat kekurangan karena UPTD Rehabilitasi PMKS bukan panti yang khusus menangani anak, melainkan panti sosial dengan berbagai jenis PMKS, yang menyebabkan keterbatasan dalam sumber daya fisik dan manusia (Hidayah, M.R., 2022)

Penelitian Fadlyah, N. (2024) berjudul *"Implementasi Program Pembinaan Kesejahteraan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan"* ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi program pembinaan kesejahteraan anak terlantar di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan kesejahteraan anak terlantar di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan telah berjalan dengan baik, namun masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, kekurangan tenaga profesional, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya program ini. Meski demikian, program ini memberikan manfaat bagi anak-anak terlantar melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi sosial (Fadlyah, N., 2024).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dalam mengidentifikasi dan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program penanganan anak terlantar di berbagai lembaga sosial. Penelitian terdahulu telah banyak membahas efektivitas program-program tersebut, namun sebagian besar penelitian menunjukkan hasil yang kurang memadai dalam hal implementasi dan pencapaian tujuan program. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi, Nira Zhafirah Puspitasari, Dewi Austine Britania, dan Kalvin Edo Wahyudi (2021) berjudul *"Efektivitas Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya"* menemukan bahwa program tersebut belum optimal dijalankan karena anak-anak belum dapat bertindak normatif dalam mengikuti aturan yang ada, serta kurangnya motivasi dan minat berprestasi dari anak-anak tersebut (Cahyadi et al., 2021).

Selain itu, Husna, L. dan Epriadi, D. (2020) dalam penelitiannya mengenai *"Kinerja Pemerintahan Daerah dalam Penanganan Anak Terlantar Usia Sekolah"* menemukan bahwa penanganan anak terlantar di Dinas Sosial Kota Batam masih belum efektif, karena tidak adanya kebijakan khusus yang mengatur penanganan anak terlantar dan kurangnya pendekatan yang memaksimalkan kinerja dinas tersebut (Husna & Epriadi, 2020). Penelitian ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang terarah dan koordinasi lintas sektor dalam program penanganan anak terlantar.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Wiryawan, A.P. (2024) mengenai *"Efektivitas Penanganan PMKS: Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal"* juga menunjukkan bahwa layanan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar belum optimal. Faktor-faktor seperti kurangnya sarana prasarana dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi penghambat utama dalam efektivitas program rehabilitasi tersebut (Wiryawan, 2024).

Penelitian Hidayah, M. R. (2022) mengenai pemenuhan kebutuhan dasar anak balita terlantar di UPTD Rehabilitasi PMKS Kabupaten Tangerang juga menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan asuh, asih, dan asah untuk anak balita terlantar. Meskipun pemenuhan kebutuhan dasar telah cukup terpenuhi, penelitian ini menunjukkan adanya keterbatasan karena UPTD Rehabilitasi PMKS bukan panti yang khusus menangani anak, melainkan panti sosial yang menangani berbagai jenis PMKS (Hidayah, M.R., 2022).

Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada pengintegrasian aspek kebijakan, program, dan tantangan implementasi yang dihadapi oleh berbagai lembaga penanganan anak terlantar. Penelitian ini berfokus pada identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasi program, serta memberikan rekomendasi yang lebih spesifik untuk meningkatkan efektivitas program penanganan anak terlantar, termasuk penguatan kebijakan, koordinasi antar sektor, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan dalam pemahaman tentang faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan program, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pengelolaan program kesejahteraan sosial yang lebih holistik dan berkelanjutan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keefektifan pelaksanaan program penanganan anak terlantar di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang dijalankan oleh Dinas Sosial. Anak terlantar merupakan salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang membutuhkan perhatian khusus karena jumlahnya terus meningkat setiap tahun.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, yang bertujuan untuk menggali secara mendalam efektivitas program penanganan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang (Creswell, J.W., 2023). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara didefinisikan sebagai proses interaksi atau komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan cara menanyakan pertanyaan langsung kepada informan atau subjek penelitian (Simangungsong, 2017) yang dilakukan dengan pejabat Dinas Sosial, petugas lapangan, serta masyarakat terkait untuk mendapatkan perspektif berbagai pihak. Observasi dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan program dan interaksi antara petugas dan anak-anak terlantar. Sedangkan, studi dokumentasi menganalisis laporan tahunan, kebijakan, dan data statistik yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis data kualitatif melalui pengklasifikasian dan penafsiran tema-tema yang muncul, serta triangulasi untuk memverifikasi keabsahan hasil (Sugiyono, 2020).

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dengan subjek penelitian yang terdiri dari pejabat Dinas Sosial, petugas lapangan, dan anak-anak terlantar yang menerima layanan. Selain itu, masyarakat yang berinteraksi dengan anak-anak terlantar juga menjadi bagian dari subjek penelitian. Penelitian ini berlangsung selama tiga bulan, dari Januari hingga Maret 2024, untuk memberikan cukup waktu bagi pengumpulan data yang komprehensif. Dengan metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai pelaksanaan program penanganan anak terlantar dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Tangerang, terletak di Provinsi Banten, memiliki luas wilayah sekitar 959,61 km² dan terdiri dari 29 kecamatan. Dengan populasi mencapai 3.209.370 jiwa pada tahun 2023, Kabupaten ini menghadapi tantangan signifikan terkait anak terlantar, yang mencapai 80.134 jiwa. Dinas Sosial Kabupaten Tangerang bertanggung jawab dalam penanganan anak terlantar melalui program rehabilitasi sosial, yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan psikososial, dan reintegrasi sosial. Kondisi geografis dan demografis yang kompleks mempengaruhi efektivitas program yang dijalankan. Setelah menggambarkan lokasi penelitian, penting untuk memahami bagaimana kondisi ini berpengaruh terhadap pelaksanaan program penanganan anak terlantar. Dalam pembahasan ini, akan diuraikan hasil penelitian yang menunjukkan keefektifan program, faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan dan pencapaian dalam penanganan anak terlantar di Kabupaten Tangerang.

3.1 Keefektifan Pelaksanaan Program Penanganan Anak Terlantar di Kabupaten Tangerang

Keefektifan organisasi diartikan dengan tingkat sejauh mana suatu organisasi merealisasikan tujuannya. Menurut Hall dalam (Tahir, 2022). Pelaksanaan program penanganan anak terlantar di Kabupaten Tangerang menunjukkan dampak positif, meskipun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal. Program ini bertujuan untuk memberikan

perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak-anak yang membutuhkan. Namun, beberapa kendala signifikan dihadapi, antara lain:

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia untuk penanganan anak terlantar di Kabupaten Tangerang masih sangat terbatas. Fasilitas yang ada, seperti panti sosial dan tempat rehabilitasi, tidak mampu menampung semua anak yang membutuhkan bantuan. Dengan jumlah anak terlantar yang mencapai 80.134 jiwa, kebutuhan akan tempat tinggal yang layak dan aman menjadi sangat mendesak. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah, yang mengakibatkan fasilitas yang ada tidak dapat beroperasi secara optimal. Banyak panti sosial yang kekurangan sumber daya, baik dalam hal tenaga kerja maupun perlengkapan yang diperlukan untuk memberikan layanan yang memadai. Selain itu, fasilitas yang ada sering kali tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan, sehingga tidak memberikan rasa aman bagi anak-anak yang tinggal di sana. Keterbatasan sarana dan prasarana ini juga berdampak pada kualitas program rehabilitasi yang dijalankan. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak-anak terlantar menjadi terhambat. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada, agar program penanganan anak terlantar dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan.

2. Kesadaran Masyarakat

Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai isu anak terlantar di Kabupaten Tangerang menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam pelaksanaan program penanganan anak terlantar. Masyarakat sering kali kurang memahami kondisi dan kebutuhan anak-anak yang mengalami keterlantaran, sehingga partisipasi aktif dalam program-program yang ada menjadi minim.

Salah satu penyebab rendahnya kesadaran ini adalah kurangnya informasi dan edukasi yang memadai mengenai isu anak terlantar. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa anak-anak yang terlantar berpotensi mengalami berbagai masalah, seperti kekurangan gizi, pendidikan yang terhambat, dan risiko eksploitasi. Tanpa pemahaman yang baik tentang kondisi ini, masyarakat cenderung mengabaikan keberadaan anak-anak terlantar dan tidak merasa terpanggil untuk berkontribusi dalam penanganannya. Selain itu, stigma negatif terhadap anak terlantar juga berperan dalam menurunkan kesadaran masyarakat. Banyak orang yang menganggap anak-anak terlantar sebagai beban sosial atau bahkan sebagai sumber masalah. Pandangan ini menyebabkan masyarakat enggan untuk terlibat dalam program rehabilitasi atau memberikan dukungan kepada anak-anak tersebut. Stigma ini sering kali diperkuat oleh media yang menyoroti kasus-kasus negatif tanpa memberikan konteks yang lebih luas tentang penyebab keterlantaran dan potensi anak-anak tersebut untuk berkembang jika diberikan dukungan yang tepat.

Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program penanganan anak terlantar juga disebabkan oleh minimnya inisiatif dari pemerintah dan lembaga terkait untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Program-program yang ada sering kali dirancang tanpa melibatkan masukan dari masyarakat, sehingga mereka merasa tidak memiliki keterikatan atau tanggung jawab terhadap program tersebut. Hal ini menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat, yang pada gilirannya mengurangi partisipasi aktif masyarakat dalam program-program yang ada.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu anak terlantar. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melalui kampanye edukasi yang menasar berbagai lapisan masyarakat. Kampanye ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat

mengenai kondisi anak-anak terlantar, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya peran mereka dalam penanganan isu ini. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan komunitas lokal juga sangat penting. Melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal dalam program-program penanganan anak terlantar dapat membantu meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi masyarakat. Tokoh masyarakat yang dihormati dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam menyebarkan informasi dan mengubah pandangan negatif terhadap anak-anak terlantar.

Penting juga untuk menciptakan platform yang memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi secara langsung, baik melalui donasi, sukarelawan, atau partisipasi dalam program-program rehabilitasi. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat, mereka akan merasa lebih memiliki tanggung jawab terhadap isu ini dan lebih termotivasi untuk berkontribusi. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu anak terlantar di Kabupaten Tangerang adalah langkah krusial dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak yang membutuhkan. Dengan kesadaran yang lebih tinggi, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam program penanganan anak terlantar, sehingga dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan anak-anak tersebut.

3. Anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan program dan fasilitas rehabilitasi untuk anak terlantar di Kabupaten Tangerang. Meskipun pemerintah daerah telah mengalokasikan dana untuk penanganan anak terlantar, jumlah yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Dengan jumlah anak terlantar yang terus meningkat, anggaran yang terbatas menghambat upaya untuk memberikan layanan yang optimal.

Salah satu dampak dari keterbatasan anggaran adalah kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai. Banyak panti sosial dan tempat rehabilitasi yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk menampung anak-anak yang membutuhkan bantuan. Fasilitas yang ada sering kali tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan, sehingga tidak dapat memberikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas program rehabilitasi yang dijalankan. Selain itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada kualitas layanan yang diberikan. Banyak program yang terpaksa dikurangi atau bahkan dihentikan karena tidak memiliki dana yang cukup. Misalnya, program pendampingan psikososial yang sangat penting bagi anak-anak terlantar sering kali tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Tanpa dukungan yang memadai, anak-anak yang mengalami trauma dan kesulitan emosional tidak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk pulih dan berintegrasi kembali ke masyarakat.

Keterbatasan anggaran juga menghambat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Tenaga profesional yang terlibat dalam penanganan anak terlantar sering kali tidak mendapatkan pelatihan yang cukup, sehingga kurang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang kompleks. Hal ini dapat mengurangi efektivitas program rehabilitasi dan memperburuk kondisi anak-anak yang membutuhkan bantuan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Mencari sumber pendanaan alternatif, seperti kerjasama dengan LSM atau sponsor dari perusahaan, dapat membantu meningkatkan anggaran yang tersedia untuk program penanganan anak terlantar. Dengan dukungan yang lebih baik, diharapkan program dan fasilitas rehabilitasi dapat berkembang dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi anak-anak yang membutuhkan.

4. Tepat Sasaran

Salah satu tantangan utama dalam penanganan anak terlantar di Kabupaten Tangerang adalah ketepatan sasaran dalam mendeteksi dan mendata anak-anak yang membutuhkan

bantuan. Banyak anak terlantar yang belum terdeteksi, sehingga mereka tidak mendapatkan akses ke program rehabilitasi dan dukungan yang diperlukan. Keterbatasan dalam sistem pendataan dan kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga terkait menyebabkan banyak kasus anak terlantar terabaikan. Akibatnya, bantuan yang diberikan sering kali tidak merata dan tidak menjangkau semua anak yang membutuhkan. Beberapa anak mungkin mendapatkan perhatian lebih, sementara yang lain tetap dalam kondisi rentan tanpa dukungan yang memadai. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya upaya yang lebih sistematis dalam mendata anak-anak terlantar, termasuk melibatkan masyarakat dan lembaga lokal dalam proses identifikasi. Dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran, diharapkan bantuan dapat diberikan secara merata dan efektif kepada semua anak yang membutuhkan.

5. Pemahaman Program

Kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat mengenai program penanganan anak terlantar menjadi salah satu hambatan signifikan dalam efektivitas pelaksanaan program tersebut di Kabupaten Tangerang. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya program rehabilitasi sosial yang ditawarkan oleh pemerintah dan lembaga terkait, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan layanan yang tersedia. Informasi yang tidak memadai mengenai tujuan, manfaat, dan cara kerja program sering kali menyebabkan masyarakat merasa skeptis atau apatis terhadap inisiatif yang ada. Tanpa pemahaman yang jelas, masyarakat cenderung tidak berpartisipasi dalam program, baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai relawan. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam upaya penanganan anak terlantar.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk menyebarkan informasi mengenai program-program yang ada. Kampanye edukasi yang melibatkan berbagai media, seperti sosial media, seminar, dan kegiatan komunitas, dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat berkontribusi secara aktif dalam mendukung program penanganan anak terlantar, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan oleh anak-anak yang membutuhkan.

6. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan faktor krusial dalam pelaksanaan program penanganan anak terlantar di Kabupaten Tangerang, yang diharapkan mampu memberikan bantuan dan rehabilitasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya sering terjadi keterlambatan akibat beberapa faktor, seperti proses administrasi yang lambat di mana verifikasi dan validasi data anak terlantar yang idealnya selesai dalam 30 hari justru dapat memakan waktu hingga lebih dari 60 hari. Selain itu, kesiapan anak juga menjadi kendala, karena anak-anak yang berada di rumah singgah atau panti sosial sering kali belum siap dikeluarkan sesuai target waktu yang ditentukan, sehingga masa tinggal mereka lebih lama dari yang direncanakan. Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas juga turut memperlambat pelaksanaan program. Keterlambatan ini secara keseluruhan dapat menghambat efektivitas proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak-anak terlantar. Oleh karena itu, sangat penting bagi Dinas Sosial Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan efisiensi proses administrasi dan memastikan semua pihak yang terlibat memahami serta memprioritaskan ketepatan waktu dalam pelaksanaan program.

7. Sumber Daya Manusia

Kekurangan tenaga profesional yang terlatih untuk menangani kasus anak terlantar di Kabupaten Tangerang menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program rehabilitasi. Banyak kasus anak terlantar yang memerlukan penanganan khusus, baik dari segi psikologis maupun sosial, namun jumlah tenaga kerja sosial dan profesional yang memiliki kompetensi di bidang ini masih sangat terbatas. Kondisi ini mengakibatkan kurangnya kualitas layanan yang diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan. Tenaga profesional yang ada

sering kali tidak memiliki pelatihan yang memadai untuk menangani masalah kompleks yang dihadapi oleh anak-anak terlantar, seperti trauma, kekerasan, dan masalah kesehatan mental. Tanpa keterampilan yang tepat, mereka mungkin tidak dapat memberikan dukungan yang efektif, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi anak-anak tersebut.

Selain itu, kekurangan sumber daya manusia yang terlatih juga berdampak pada program-program rehabilitasi yang tidak dapat berjalan secara optimal. Banyak inisiatif yang terpaksa dibatalkan atau ditunda karena tidak adanya tenaga profesional yang cukup untuk melaksanakan program tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penanganan anak terlantar. Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah dapat membantu meningkatkan kapasitas tenaga kerja sosial dan profesional. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diharapkan program rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi anak-anak yang membutuhkan.

3.2 Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Program Penanganan Anak Terlantar Di Kabupaten Tangerang

Pelaksanaan program penanganan anak terlantar di Kabupaten Tangerang menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Beberapa faktor utama yang menghambat antara lain:

1. Validitas Data

Validitas data merupakan salah satu faktor krusial dalam pelaksanaan program penanganan anak terlantar di Kabupaten Tangerang. Data yang tidak akurat dan kurang valid dapat mengakibatkan kesulitan dalam menargetkan anak-anak yang benar-benar membutuhkan bantuan. Ketidakakuratan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya sistem pengumpulan data yang efektif, serta keterbatasan dalam pelaporan dari masyarakat dan lembaga terkait.

Banyak anak terlantar yang tidak terdata atau terdeteksi oleh Dinas Sosial, sehingga mereka tidak mendapatkan akses terhadap layanan yang diperlukan. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam penanganan, di mana anak-anak yang seharusnya mendapatkan perhatian justru terabaikan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sistem validasi data, termasuk pelatihan bagi petugas lapangan dan penggunaan teknologi informasi yang lebih baik, agar data yang diperoleh lebih akurat dan dapat diandalkan. Dengan data yang valid, program penanganan dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam membantu anak-anak terlantar.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai sangat penting dalam penanganan anak terlantar di Kabupaten Tangerang. Namun, saat ini terdapat keterbatasan fasilitas yang dapat menampung dan merawat anak-anak tersebut. UPTD Rehabilitasi Sosial hanya memiliki satu rumah singgah yang tidak cukup untuk menampung semua anak terlantar yang membutuhkan bantuan. Kondisi ini menyebabkan banyak anak terlantar terpaksa tinggal di jalanan atau di tempat yang tidak layak, sehingga meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan mereka.

Keterbatasan infrastruktur juga menghambat aksesibilitas layanan yang diperlukan, seperti pendidikan, kesehatan, dan rehabilitasi sosial. Tanpa sarana yang memadai, upaya untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada anak-anak terlantar menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya investasi dalam pembangunan dan pengembangan fasilitas yang lebih baik, serta peningkatan kerjasama antara pemerintah dan lembaga swasta untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak terlantar.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam penanganan anak terlantar, namun saat ini terdapat kekurangan tenaga profesional yang terlatih, seperti pekerja sosial dan psikolog. Tenaga-tenaga ini memiliki peran krusial dalam memberikan dukungan psikologis dan sosial kepada anak-anak yang mengalami trauma akibat situasi mereka. Tanpa

adanya jumlah tenaga profesional yang memadai, penanganan kasus anak terlantar menjadi tidak optimal.

Selain itu, beban kerja yang tinggi pada tenaga yang ada juga menjadi masalah signifikan. Dengan jumlah kasus yang terus meningkat, tenaga profesional sering kali harus menangani lebih banyak kasus daripada yang dapat mereka kelola secara efektif. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan, di mana anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus mungkin tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, rekrutmen, dan penyediaan insentif yang menarik agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi anak-anak terlantar.

4. Pemahaman Program

Pemahaman program penanganan anak terlantar di Kabupaten Tangerang masih menjadi tantangan yang signifikan. Banyak masyarakat dan operator desa yang kurang memahami tujuan, mekanisme, dan manfaat dari program-program yang ada. Kurangnya pengetahuan ini dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya penanganan anak terlantar, serta mengurangi efektivitas program yang telah dirancang.

Sosialisasi yang belum optimal mengenai program-program tersebut menjadi salah satu penyebab utama kurangnya pemahaman. Informasi yang tidak tersebar luas atau tidak disampaikan dengan cara yang mudah dipahami membuat masyarakat tidak menyadari adanya inisiatif yang dapat membantu anak-anak terlantar. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam melakukan sosialisasi, seperti penyuluhan, kampanye, dan pelatihan bagi masyarakat dan operator desa. Dengan meningkatkan pemahaman tentang program penanganan anak terlantar, diharapkan masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam mendukung dan melaksanakan program tersebut, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara maksimal.

5. Anggaran

Anggaran yang tersedia untuk program penanganan anak terlantar di Kabupaten Tangerang masih sangat terbatas, sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan. Keterbatasan ini mengakibatkan banyak aspek penting dalam penanganan anak terlantar terabaikan, termasuk layanan rehabilitasi dan pendidikan yang esensial untuk pemulihan mereka. Sebagian besar fokus anggaran saat ini lebih diarahkan pada kebutuhan dasar, seperti makanan dan pakaian, yang memang sangat penting untuk kelangsungan hidup anak-anak tersebut. Namun, perhatian yang kurang terhadap pengembangan program rehabilitasi dan dukungan psikososial dapat menghambat proses reintegrasi anak-anak ke dalam masyarakat. Tanpa adanya program yang komprehensif dan berkelanjutan, anak-anak terlantar berisiko mengalami kesulitan dalam beradaptasi dan membangun masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan perencanaan anggaran yang lebih baik, dengan mempertimbangkan alokasi dana yang seimbang antara kebutuhan dasar dan pengembangan program rehabilitasi. Dengan demikian, program penanganan anak terlantar dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kehidupan anak-anak tersebut.

3.3 Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Program Penanganan Anak Terlantar Di Kabupaten Tangerang

1. Pemerataan Program

Pemerataan program penanganan anak terlantar di Kabupaten Tangerang sangat penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan informasi dan akses yang sama terhadap program tersebut. Meningkatkan sosialisasi program kepada masyarakat secara merata dapat membantu menciptakan kesadaran yang lebih besar mengenai isu anak terlantar dan upaya yang dilakukan untuk menanganinya.

Sosialisasi yang efektif harus mencakup berbagai metode, seperti penyuluhan di tingkat desa, kampanye media sosial, dan kolaborasi dengan organisasi lokal. Dengan cara ini, informasi mengenai program penanganan anak terlantar dapat menjangkau lebih banyak orang, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil.

Selain itu, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya melaporkan keberadaan anak terlantar juga sangat krusial. Masyarakat perlu menyadari bahwa mereka memiliki peran aktif dalam melindungi anak-anak di sekitar mereka. Melalui pelatihan dan penyuluhan, masyarakat dapat diajarkan cara mengenali tanda-tanda anak terlantar dan prosedur yang tepat untuk melaporkannya kepada pihak berwenang. Dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, diharapkan program penanganan anak terlantar dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang lebih besar.

2. Reward dan Punishment

Pemerintah Kabupaten Tangerang menerapkan sistem *reward* dan *punishment* untuk meningkatkan validitas data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya anak terlantar. Operator desa diberi target verifikasi dan validasi data sebanyak 200 orang per triwulan. Namun, target ini sering tidak tercapai karena operator merangkap banyak tugas lain, sehingga kinerjanya tidak maksimal. Untuk mendorong kinerja, diberikan insentif kepada operator yang memenuhi target. Sebaliknya, operator yang tidak mencapai target tidak diberikan insentif. Kebijakan ini bertujuan untuk memotivasi kinerja yang lebih baik dalam pendataan PMKS.

3. Kerja Sama

Pemerintah Kabupaten Tangerang menjalin kerja sama dengan panti, yayasan, dan LSM yang fokus pada pendidikan dan keterampilan untuk mendukung pelaksanaan program penanganan anak terlantar. Kerja sama ini bertujuan memastikan keakuratan data administrasi anak terlantar serta memberikan pembinaan psikologis dan keterampilan bagi mereka. Selain itu, masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif, misalnya dengan melaporkan keberadaan anak terlantar yang belum terdata, agar program dapat menjangkau sasaran secara lebih tepat dan menyeluruh.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Keefektifan Pelaksanaan Program Penanganan Anak Terlantar di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, temuan ini menunjukkan bahwa program yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tangerang telah memberikan dampak positif, namun belum berjalan secara optimal. Beberapa hambatan utama ditemukan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, ketidakakuratan data, keterbatasan anggaran, serta kekurangan tenaga profesional.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Biru Bara Nirvana et al. (2021) mengenai *Efektivitas Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan di Kota Surabaya*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa program belum berjalan optimal karena kurangnya motivasi anak, serta keterbatasan dalam mengikuti aturan. Sama halnya, dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa partisipasi anak-anak dan masyarakat masih rendah serta belum merata, yang berpengaruh terhadap keberhasilan program.

Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Leny Husna dan Dedi Epriadi (2020) yang menyatakan bahwa penanganan anak terlantar usia sekolah di Kota Batam belum efektif, disebabkan oleh ketiadaan kebijakan khusus dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Tangerang, di mana validitas data dan ketepatan sasaran menjadi kendala karena kurangnya kebijakan teknis dan sinergi antarinstansi yang terlibat.

Berbeda dengan penelitian Hidayah (2022) yang menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar anak balita terlantar di UPTD Rehabilitasi PMKS Kabupaten Tangerang sudah cukup terpenuhi dalam aspek asuh, asih, dan asah, penelitian ini justru menemukan bahwa pemenuhan kebutuhan anak belum optimal secara menyeluruh. Terutama bagi anak-anak yang berada di luar sistem panti sosial, karena keterbatasan jumlah tenaga profesional dan fasilitas.

Selanjutnya, penelitian ini mendukung temuan Avita Putri Wiryawan (2024) yang menekankan pentingnya perbaikan sarana, prasarana, dan peningkatan SDM dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial. Sama halnya, penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan kapasitas fisik dan jumlah tenaga profesional menjadi faktor penghambat signifikan.

Sama halnya dengan temuan Fadlyah (2024) di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, program pembinaan anak terlantar memberikan manfaat tetapi terkendala oleh anggaran, tenaga profesional, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Hal tersebut identik dengan kondisi yang ditemukan di Kabupaten Tangerang, di mana aspek anggaran dan dukungan masyarakat menjadi isu sentral dalam pelaksanaan program yang efektif.

Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak hanya memperkuat hasil-hasil sebelumnya, namun juga memberikan kontribusi berupa penekanan pada perlunya validasi data dan sinergi lintas aktor, termasuk LSM dan masyarakat umum, untuk mendorong ketercapaian sasaran dan keberlanjutan program penanganan anak terlantar.

IV. KESIMPULAN

Keefektifan pelaksanaan program penanganan anak terlantar di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dapat disimpulkan bahwa program yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tangerang telah memberikan dampak positif, namun belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan program ini, jika ditinjau melalui tujuh indikator pelaksanaan, menunjukkan adanya berbagai kendala yang masih perlu diperbaiki. Sarana dan prasarana yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga belum seluruh anak terlantar dapat merasakan manfaat dari program ini. Kesadaran masyarakat terhadap isu anak terlantar pun masih tergolong rendah, ditambah dengan adanya stigma negatif yang menghambat proses reintegrasi sosial bagi anak-anak tersebut. Dari segi pendanaan, anggaran yang tersedia belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan program, sehingga membatasi inovasi dan ruang gerak pelaksanaannya. Selain itu, pelaksanaan program ini dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran karena masih banyak anak terlantar yang belum terdata secara valid oleh Dinas Sosial, sehingga bantuan yang disalurkan belum maksimal. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program juga menjadi faktor penghambat partisipasi aktif. Pelaksanaan program seringkali mengalami keterlambatan akibat proses administrasi yang belum efisien. Di samping itu, jumlah tenaga profesional seperti pekerja sosial dan psikolog masih sangat terbatas, yang berdampak langsung pada kualitas layanan yang diberikan. Secara umum, hambatan utama pelaksanaan program meliputi validitas data yang belum akurat, keterbatasan fasilitas dan anggaran, stigma sosial terhadap anak terlantar, serta kekurangan tenaga profesional dalam menangani kasus-kasus secara efektif. Meskipun demikian, partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor pendukung penting yang memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan program penanganan anak terlantar di Kabupaten Tangerang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni terbatas pada waktu pelaksanaan yang singkat, keterbatasan akses data internal, serta kurangnya perspektif dari anak terlantar sebagai penerima manfaat program secara langsung.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan anak terlantar sebagai responden utama, memperluas wilayah studi, serta

mengeksplorasi pendekatan kolaboratif lintas sektor dalam penanganan anak terlantar secara lebih komprehensif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada Bapak Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si selaku Plt. Rektor IPDN; Bapak Dr. Halilul Khairi, M.Si selaku Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan; Dr. Asep Hendra, SE, M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Pemerintahan Daerah; serta Ibu Marthalina, S.IP, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan. Penghargaan mendalam juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua, keluarga besar, rekan-rekan Praja Utama kelas D4, saudara kabupaten asal Kabupaten Tangerang, dan semua pihak yang telah memberikan doa, semangat, bantuan, dan motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi, B. B. N., Puspitasari, N. Z., Britania, D. A., & Wahyudi, K. E. (2021). Efektivitas program pelayanan kesejahteraan sosial anak jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(5), 731-742. <https://jst.publikasiindonesia.id/index.php/jst/article/view/153/303>
- Cascio, W. F. (1995). *Managing human resources: Productivity, quality of work life, profits*. McGraw-Hill.
- Creswell, J. W. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications, Inc.
- Fadlyah, N. (2024). Implementasi program pembinaan kesejahteraan anak terlantar di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/82898/1/SKRIPSI%20NADA%20FADLYAH%20LENGKAP.pdf>
- Fekamahsa, R. A., & Effendy, K. (2024). Sinergitas satuan polisi pamong praja dan Dinas Sosial dalam penanganan orang terlantar di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah (Doctoral dissertation, IPDN). <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18454>
- Fitryasari, R., Nihayati, H. E., Yusuf, A., Islamiyah, T., Hikmawati, S. I., Ayu, E. Q., Agustin, R., & Lin, E. C.-L. (2023). Analysis of factors related to the resilience of street children in Surabaya City, Indonesia. *International Journal of Adolescent Medicine and Health*. <https://doi.org/10.1515/ijamh-2022-0104>
- Hidayah, E. (2020). *Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan*. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(2). <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1103>
- Hidayah, M. R. (2022). Anak balita terlantar (Studi kasus di UPTD Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Tangerang) (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62157>
- Husna, L., & Epriadi, D. (2023). Analisis kinerja pemerintah daerah dalam penanganan anak terlantar usia sekolah (Studi pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Batam). *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(4), 865-870. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2494>
- Nurwati, N., Fedryansyah, M., & Achmad, W. (2022). Social policy in the protection of street children in Indonesia. *Journal of Governance*, 7(3). <https://doi.org/10.31506/jog.v7i3.16366>

- Rachmawati, V., & Faedlulloh, D. (2021). Dynamics of policy implementation for street children social welfare problems. *Journal of Political Issues*, 2(2), 67–78. <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i2.38>
- Razak, R. E. Z. A., & Abdul. (2022). Kinerja aparatur dalam penanganan anak terlantar melalui program penyandang masalah kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur (Doctoral dissertation, IPDN). <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/9201>
- Simangungsong, F. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoritik- Legalistik-Empirik-Inovatif. Bandung: Alfabeta.
- Steers, R. M. (1984). *Organizational behavior*. Scott, Foresman and Company.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tahir, M. I. (2022). Keefektifan Organisasi Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Sukoharjo, Jawa Tengah: Epigraf Komunikata Prima.
- Victory, M., & Sartika, I. (2024). Collaborative governance dalam penanganan anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah (Doctoral dissertation, IPDN). <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18784>
- Wirawan, A. P. (2024). Analisis efektivitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS): Rehabilitasi sosial anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(4), 233-247. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/47246>

